

**PERAN *CORPORATE GOVERNANCE*
DAN *FINANCIAL LITERACY***

**Dalam Menurunkan Risiko Kredit UKM
di Jawa Tengah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9:

2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Indri Kartika, SE, M.Si., Ak., CA
Prof. Dr. Mutamimah, SE, MSi

**PERAN *CORPORATE GOVERNANCE*
DAN *FINANCIAL LITERACY***
Dalam Menurunkan Risiko Kredit UKM
di Jawa Tengah



Penerbit Lakeisha
2023

PERAN CORPORATE GOVERNANCE DAN FINANCIAL LITERACY
dalam Menurunkan Risiko Kredit UKM di Jawa Tengah

Penulis:

Dr. Indri Kartika, SE, M.Si., Ak., CA

Prof. Dr. Mutamimah, SE, MSi

Editor : Dr. H. Dasmadi., SE. MM

Layout : Yusuf Deni Kristanto, S.Pd

Desain Cover : Tim Lakeisha

Cetak I Mei 2023

15,5 cm × 23 cm, 56 Halaman

ISBN: 978-623-420-772-9

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha

(Anggota IKAPI No.181/JTE/2019)

Redaksi

Srikaton, RT 003, RW 001, Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Jawa Tengah

Hp. 08989880852, Email: penerbit_lakeisha@yahoo.com

Website: www.penerbitlakeisha.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah tercurah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul *PERAN CORPORATE GOVERNANCE DAN FINANCIAL LITERACY dalam Menurunkan Risiko Kredit UKM di Jawa Tengah*.

Tujuan penulisan buku ini diharapkan menjadi referensi bagi para akademisi, peneliti, praktisi, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menambah khasanah pengetahuan tentang *Corporate Governance* dan *Financial Literacy* dalam menurunkan risiko kredit UKM khususnya di Jawa Tengah.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan buku ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih banyak kekuarangan, sehingga saran dan masukan sangat penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Semarang, Mei 2023

Penulis,

Dr. Indri Kartika, SE, M.Si., Ak., CA

Prof. Dr. Mutamimah, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAGIAN PERTAMA	
PROLOG	1
1.1 Peran Strategis UKM	1
1.2 Strategi Menurunkan Risiko Kredit dan Penerapan Corporate Governance	2
1.3 Kajian-Kajian tentang <i>Corporate Governance</i>	3
BAGIAN KEDUA	
KAJIAN TENTANG RISIKO KREDIT, PERAN CORPORATE GOVERNANCE, DAN FINANCIAL LITERACY	
1.4 Risiko Kredit dan Corporate Governance	7
1.5 Financial Literacy dan Risiko Kredit	9
1.6 Pengembangan Model Studi Kasus	13
BAGIAN KETIGA	
GAMBARAN CORPORATE GOVERNANCE DAN FINANCIAL LITERACY UKM DI JAWA TENGAH	
	20
BAGIAN KEEMPAT	
ANALISIS PERAN CORPORATE GOVERNANCE DAN FINANCIAL LITERACY DALAM MENURUNKAN RISIKO KREDIT	
	33

BAGIAN KELIMA
PENGARUH PERAN CORPORATE GOVERNANCE DAN
FINANCIAL LITERACY DALAM MENURUNKAN
RISIKO KREDIT UKM DI JAWA TENGAH 40

5.1	Transparansi Mempunyai Pengaruh Terhadap Risiko Kredit.....	40
5.2	Akuntabilitas Mempunyai Pengaruh Terhadap Risiko Kredit.....	41
5.3	Responsibilitas Mempunyai Pengaruh Terhadap Risiko Kredit.....	42
5.4	Independensi Mempunyai Pengaruh Terhadap Risiko Kredit.....	42
5.5	Fairness Mempunyai Pengaruh Terhadap Risiko Kredit.....	43
5.6	Financial Literasi Mampu Memoderasi Pengaruh Transparansi Terhadap Risiko Kredit.....	44
5.7	Financial Literasi Mampu Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Risiko Kredit.....	44
5.8	Financial Literasi Mampu Memoderasi Pengaruh Responsibilitas Terhadap Risiko Kredit.....	45
5.9	Financial Literasi Memoderasi Pengaruh Independensi Terhadap Risiko Kredit.....	45
5.10	Financial Literasi Tidak Dapat Memoderasi Pengaruh Fairness Terhadap Risiko Kredit.....	46

BAGIAN KEENAM
EPILOG 47

6.1	Simpulan.....	47
6.2	Keterbatasan dan <i>Future Research</i>	48
6.3	Implikasi.....	48

DAFTAR PUSTAKA..... 50
TENTANG PENULIS 55

BAGIAN PERTAMA

PROLOG

1.1 Peran Strategis UKM

UKM mempunyai peran strategis dalam perkembangan ekonomi, baik di negara maju maupun di negara berkembang (Abor & Quartey, 2010; Jindrichovska, 2013; Musah & Ibrahim, 2014; Karadag, 2015; and Muneer et al., 2017). Namun pertumbuhan UKM masih lambat, karena terbatasnya akses keuangan (Ashley Mutezo, 2013; Yoshino, et al., 2016; Haider, 2018). Sebenarnya pada tahun 2018 pemerintah Indonesia sudah mewajibkan perbankan untuk mengalokasikan kredit kepada UKM sebesar 20%, namun masih ada sebagian UKM yang belum dapat mengakses modal dari perbankan, berarti telah terjadi financial inclusion gap antara lembaga keuangan sebagai kreditur (*supply side*) dengan UKM sebagai debitur (*demand side*). Terbatasnya akses keuangan karena UKM tidak mempunyai *collateral* bahkan sebagian besar UKM tidak

mempunyai laporan keuangan yang memadai (Haider, 2018; Nelson and Onias Manyani, 2011 dan Andrew and Gikunoo, 2011; Ashley Mutezo, 2013). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian bahwa UKM masuk pada kelompok “*high risk borrower*” (Z. Zairani, et al.,2013) dan NPL (Non Performing Loan) untuk UKM Indonesia lebih tinggi dari non-UKM (Mutamimah dan Hendar, 2017). Bahkan Ciftci et al. (2019) menemukan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi pada keluarga mempunyai risiko tinggi, seperti karakteristik UKM di Indonesia yang secara mayoritas merupakan family business. Dengan fenomena tersebut menjadi alasan bagi perbankan untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada UKM. Risiko kredit perspektif UKM terjadi ketika UKM sebagai nasabah gagal melunasi utang saat jatuh tempo (Kolapo, et al. 2012), sehingga akan merugikan kreditur maupun stakeholders lain (Postnova Alexandra, 2012).

1.2 Strategi Menurunkan Risiko Kredit dan Penerapan Corporate Governance

Salah satu strategi untuk menurunkan risiko kredit adalah dengan penerapan *corporate governance*. Sebagaimana dinyatakan oleh Javed Hussain et.al (2018), bahwa UKM mempunyai tingkat risiko tinggi karena adanya asymmetric information. Diharapkan dengan adanya corporate governance dapat menghilangkan asymmetric information dan risiko kredit bisa diturunkan. Tidak ada model corporate governance yang single untuk semua jenis perusahaan (Dao,Binh et al, 2015). Dengan demikian corporate governance pada UKM berbeda

dengan corporate governance pada perusahaan besar yang sudah go public. Hal ini karena UKM di Indonesia mempunyai beberapa karakteristik, antara lain: a). Model pengelolaan manajemen UKM masih *one man show*, *family business*, sehingga tidak ada pemisahan antara kepemilikan dan kontrol. Seseorang bisa menjabat sebagai direktur sekaligus sebagai pemilik perusahaan, bahkan sering terjadi bahwa fungsi-fungsi manajemen yang lain dipegang oleh satu orang (Wahyudi, 2008). b). UKM di Indonesia mayoritas belum *go public*, sehingga masalah keagenan yang memicu terjadinya konflik keagenan nya berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Masalah keagenan pada UKM bukan masalah keagenan antara investor dengan manajer, namun masalah keagenan antara kreditur dengan debitur, serta stakeholders lain.

1.3 Kajian-Kajian tentang *Corporate Governance*

Penelitian-penelitian yang menganalisis *corporate governance* di UKM Indonesia masih terbatas. Munculnya *corporate governance* dijelaskan oleh *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan antara principal dan agen menimbulkan masalah keagenan. Perbankan sebagai *principal* (kreditur) memberikan kepercayaan kepada UKM sebagai agen (debitur) agar mampu mengelola dana yang dipinjam dengan baik sesuai harapan prinsipal. Namun adanya *asymmetric information* mendorong manajer UKM melakukan *opportunistic behavior* dengan tujuan

untuk mengutamakan kepentingan mereka dan merugikan pihak kreditur serta stakeholders lain. Pengelolaan tersebut sering melanggar aturan-aturan yang standar, sehingga UKM tidak bisa melunasi pinjaman tepat waktu, yang disebut *credit risk* UKM. As ecoDa (2010) menjelaskan bahwa *corporate governance* bagi perusahaan yang tidak *go public* adalah tentang bagaimana menyusun kerangka kerja sebagai pedoman dalam pengelolaan bisnis sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan maupun stakeholders lain. Ada 5 prinsip *corporate governance* UKM, yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan fairness (Hanifah, 2015).

Hasil penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap risiko kredit menunjukkan hasil yang berbeda. Postnova A. (2012) dan Dzigba, David (2015) menyatakan bahwa *corporate governance* tidak dapat menurunkan risiko kredit. Namun Binh Dao & Hoa Pham (2015) menunjukkan *corporate governance* dapat menurunkan risiko kredit. Penelitian ini dimotivasi adanya masalah risiko kredit UKM yang belum terselesaikan hingga saat ini, serta adanya hasil penelitian yang tidak konsisten satu dengan yang lain antara *corporate governance* dengan *credit risk*. Dengan fenomena tersebut mendorong peneliti untuk memasukkan *financial literacy* sebagai variabel moderasi. **Inilah novelty** dalam penelitian ini. Hal tersebut memperkuat pernyataan bahwa untuk meningkatkan kinerja dan sustainability UKM yang tentunya dapat mendorong perusahaan untuk membayar utang dan bunga tepat waktu, maka UKM seharusnya mengoptimalkan internal resource yang dimiliki baik yang bersifat tangible

maupun intangible aset. *Financial literacy* sebagai bentuk *intangible aset* yang harus dimiliki oleh manajer UKM sebagaimana dijelaskan oleh *Resource Based View Theory* (Wernerfelt, 1984 ; Coleman, Susan, Carmen Cotei, Joseph Farhat, 2013; Greene, Brush, & Brown, 2015).

Penelitian sebelumnya mengabaikan pentingnya *financial literacy* dalam pengambilan keputusan keuangan maupun dalam implementasi *corporate governance*. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan Fatoki (2014) bahwa dengan memiliki *financial literacy* yang baik, seorang pelaku usaha diharapkan mampu membuat keputusan keuangan yang tepat dan efisien sehingga dapat menurunkan risiko kredit. Banyak manajer UKM yang usahanya gulung tikar karena kesalahan dalam mengelola keuangan dan berimbas pada penurunan kinerja keuangan dan ketidakmampuan UKM dalam melunasi utangnya saat jatuh tempo. Drexler et al., (2014) menyatakan bahwa manajer harus mempunyai *financial literacy* yang komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan keuangan yang optimal, sehingga dapat menurunkan risiko kredit.

Para pakar mendefinisikan *financial literacy* dengan definisi yang beragam, dan tidak ada satu definisi universal tentang *financial literacy* (Huston, 2010). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016, Literasi Keuangan adalah pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan

kewajiban terkait produk dan jasa keuangan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Lusardi & Mitchell (2006) menyatakan bahwa *Financial literacy* merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.

BAGIAN KEDUA

KAJIAN TENTANG RISIKO KREDIT, PERAN CORPORATE GOVERNANCE, DAN FINANCIAL LITERACY

1.4 Risiko Kredit dan Corporate Governance

Risiko selalu muncul dalam setiap pengambilan keputusan pendanaan, sehingga manajer UKM dituntut untuk selalu mengelola risiko dengan baik. Risiko kredit adalah kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo (Sri Haryati dan Emanuel Kristijadi, 2014). Risiko kredit merupakan gagal bayar dari debitur atas sebagian atau seluruh utang dan bunganya (Dao & Hoa Pham, 2015). Salah satu mekanisme untuk mengurangi risiko kredit adalah dengan implementasi *corporate governance*. *Corporate governance* didasari adanya *agency problem*, karena dua hal, yaitu: a). terjadinya *asymmetric information*, dimana UKM sebagai agen memiliki

lebih banyak informasi dibanding perbankan sebagai prinsipal baik mengenai kondisi keuangan maupun non-keuangan UKM; b) terjadinya *conflict of interest*, dimana manajer UKM sebagai agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan perbankan sebagai principal. Dengan kondisi tersebut di atas, mendorong pihak UKM melakukan tindakan *opportunistic* serta penyimpangan lain dalam melakukan pengelolaan keuangan. Selain itu, secara umum pihak UKM sebagai agen akan lebih mengutamakan kepentingan mereka dibanding kepentingan perbankan sebagai principal dijelaskan oleh *agency theory* (Jensen and Meckling, 1976). Definisi Corporate governance UKM menurut The European Confederation of Directors Associations (ecoDa, 2010) adalah tata kelola untuk membangun kerangka kerja, proses dan sikap perusahaan untuk meningkatkan nilai, reputasi dan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Mekanisme serupa juga terimplementasi pada UKM di negara lain, misalnya Abor and Adjasi (2007) sebuah studi di Ghana dan Dube, Dube dan Mishra (2011) di India, Htay dan Salman (2013) di Malaysia. Implementasi corporate governance bermanfaat dalam rangka membantu UKM untuk memperbaiki prospek mereka dalam rangka mendapatkan alternatif pendanaan baik dari investor maupun perbankan. Implementasi prinsip corporate governance pada UKM berdampak langsung terhadap pelaksanaan pencatatan dan akuntansi yang proper serta pengungkapan informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan para investor maupun kreditur terhadap UKM tersebut (Abor and Adjasi, 2007a; Dube, Dube and Mishra, 2011).

Terdapat dua mekanisme *corporate governance*, yaitu internal dan *external corporate governance* (Wu, Lin, Lin & Lai; 2009). *The internal corporate governance* merupakan mekanisme, aturan dan pedoman yang jelas tentang pengelolaan UKM, sehingga manajer UKM dapat mengembalikan pinjaman modal tepat waktu. Sebaliknya *external corporate governance* adalah mekanisme untuk memonitor serta mengontrol perilaku manajer UKM melalui aturan eksternal serta menekankan keterlibatan *stakeholders* lain, termasuk kreditur maupun investor. Kedua mekanisme tersebut saling terkait, artinya kualitas mekanisme eksternal sangat ditentukan oleh mekanisme internal (Mutamimah, 2018). Beberapa prinsip *corporate governance* UKM, antara lain: *transparency, accountability, fairness, responsibility, and independence* (Hanifah, 2015).

1.5 Financial Literacy dan Risiko Kredit

Pentingnya *financial literacy* dijelaskan oleh *Resource-Based View* (RBV) *theory* yang dikembangkan oleh Wernerfelt (1984) dan Coleman, Susan, Carmen Cotei, Joseph Farhat (2013). Teori tersebut menjelaskan bahwa kinerja dan sustainability organisasi sangat ditentukan oleh internal resources yang dimiliki dan dikontrol oleh organisasi. Resource tersebut dapat berupa: *physical resources, financial resources, technological resources, human resources, dan organizational resources* (Greene, Brush, & Brown, 2015). Bahkan Esteve-Pérez and Manez-Castillejo (2008) mengelompokkan menjadi dua kelompok,

yaitu: *tangible and intangible aset*. *Tangible aset* meliputi: mesin, bangunan, saham, utang, dan laba ditahan. Sedangkan *intangible aset* meliputi: pengetahuan kewirausahaan, keterampilan, pengalaman, prosedur organisasi dan reputasi, antara lain (Eniola & Entebang, 2014). Dengan demikian *financial literacy* harus dioptimalkan sehingga dapat menurunkan risiko kredit.

Para pakar mendefinisikan *financial literacy* dengan definisi yang beragam, sebagaimana dijelaskan oleh Huston (2010) bahwa tidak ada definisi universal tentang *financial literacy*. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016, Literasi Keuangan adalah pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Fatoki (2014) menyatakan bahwa dengan memiliki kecakapan maupun keterampilan keuangan yang baik, pelaku usaha diharapkan mampu membuat keputusan keuangan yang tepat dan efisien, sehingga dapat membayar pinjaman tepat waktu. Banyak pengusaha yang bisnisnya bangkrut, karena kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan berimbas pada penurunan kinerja keuangan, sehingga manajer tidak mampu melunasi utang pada saat jatuh tempo. Smith (2011) menyatakan bahwa jika manajer UKM tidak mempunyai literasi keuangan, maka akan menghambat mereka dalam melakukan analisis bisnis yang rasional, sehingga menyebabkan kerugian dalam bisnisnya. Hal ini menjadi alasan bagi manajer UKM agar

mempunyai well financial literacy. Menurut Karisma Ardi (2017) beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pengusaha terkait dengan pengelolaan keuangan bisnisnya adalah mencampuradukkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, minimnya pengetahuan di bidang akuntansi, tidak jelas atau tidak adanya perencanaan keuangan yang memadai, kurang memahami arus kas, dan ketidaksadaran akan pentingnya pengelolaan modal usaha. Demikian juga menurut Joo dan Grable (2000) yang menyatakan bahwa literasi keuangan memang perlu dikuasai dan dipraktikkan oleh pengusaha, seperti UKM. Jika UKM mempunyai pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan keyakinan tentang pengelolaan keuangan maka risiko kredit dapat diturunkan. *Financial literacy* dapat memoderasi kesenjangan informasi dan meningkatkan praktik manajemen keuangan profesional, berarti pula dapat mengurangi risiko kredit (Adomako et al., 2016).

Anthony Abiodun Eniola, and Entebang, Harry (2016) menyatakan bahwa hambatan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja UKM di negara berkembang adalah kurangnya pengetahuan, keterampilan, sikap dan kesadaran untuk mengatasi dan mengarahkan keuangan organisasi mereka dengan cara yang profesional. Lusardi dan Michell (2006) mengemukakan bahwa literasi keuangan diperlukan untuk membuat ukuran kompetensi keuangan, yaitu, untuk tetap memiliki pengetahuan tentang masalah keuangan. Lusardi dan Bassa Scheresberg (2013) meneliti dampak literasi keuangan dan tingginya biaya peminjam. Hasilnya

menunjukkan bahwa ada hubungan antara literasi keuangan dan peminjam berbiaya rendah. Sebagian besar peminjam berbiaya tinggi menunjukkan tingkat financial literacy yang dimiliki debitur sangat rendah.

Berdasarkan strategi nasional *financial literacy*, *financial literacy* masyarakat dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu: a). *Well Literate*, pada tahap ini, seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. . Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh OJK (2013), maka tingkat ukuran *well literate* yaitu 21,84%. b). *Suff Literate*, pada tahap ini, seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh OJK (2013), maka tingkat ukuran *well literate* yaitu 21,84%. c). *Less Literate*, pada tahap ini, seseorang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. d). *Not Literate*, pada tahap ini, seseorang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Literasi keuangan terbagi dua yaitu *external financial literacy* dan *internal financial literacy*. *External financial literacy* merupakan kemampuan manajer dalam menggunakan pengetahuan keuangan dasar saja namun juga ketrampilan untuk melakukan *networks* dan komunikasi dengan pihak eksternal dalam bidang keuangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Bijaksana, 2013). Literasi keuangan internal merupakan pemahaman manajer UKM untuk mengoptimalkan sumber pendanaan secara efektif dan efisien. Selain itu, literasi keuangan dapat memungkinkan manajer untuk lebih kreatif dalam memilih berbagai tawaran utang serta penggunaannya (Reich dan Berman, 2015; Adomako et al., 2016). Dengan demikian, adanya kemampuan dan ketrampilan manajer tentang lembaga keuangan, jenis produk, benefit maupun risiko produk dan jasa keuangan akan dapat menurunkan risiko kredit UKM.

1.6 Pengembangan Model Studi Kasus

1.6.1 Transparansi dan Risiko Kredit

Transparency merupakan salah satu prinsip *corporate governance* dimana manajer UKM harus menyampaikan informasi keuangan maupun non keuangan secara tepat, cepat dan benar kepada perbankan maupun *stakeholders* lain. Informasi keuangan minimal berupa neraca maupun laporan rugi laba, serta laporan perubahan modal, sedangkan laporan non keuangan seperti aktivitas bisnis riil yang dilakukan perusahaan. Dengan sikap transparansi ini secara otomatis

manajer UKM akan melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan kreditur, sehingga risiko kredit bisa dikurangi. Selain itu, adanya transparansi ini akan menghilangkan asymmetric information sehingga risiko kredit bisa diturunkan. Hanifah (2015) menemukan implementasi transparansi UKM rata-rata sebesar 31%. Ini berarti bahwa UKM sudah cukup dalam melakukan pengungkapan informasi material dan non-material mengenai perusahaan, secara internal maupun eksternal. Hipotesisnya:

H1: Transparansi mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko kredit

1.6.2 Akuntabilitas dan Risiko Kredit

UKM harus mematuhi peraturan yang sudah disepakati serta terdapat sistem monitoring dan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas secara periodic. Ketika manajer UKM melakukan monitoring dan evaluasi secara periodic, akan segera ditemukan jika terdapat penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan sehingga UKM dapat melunasi utang tepat waktu. Selain itu, tujuan lain dari akuntabilitas adalah agar manajer UKM tidak melakukan tindakan opportunistic yang merugikan perbankan maupun *stakeholders* lain. Hal ini selanjutnya akan berdampak pada penurunan risiko kredit. Hipotesisnya:

H2: Akuntabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko kredit

1.6.3 Responsibilitas dan Risiko Kredit

UKM mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan maupun non keuangan secara periodik, mentaati peraturan perundangan yang berlaku untuk kepentingan internal maupun eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban UKM. Hasil temuan Hanifah (2015) menunjukkan bahwa implementasi responsibilitas UKM sangat baik. Berarti bahwa UKM sudah mematuhi hukum dan peraturan, dan telah bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan serta kepada pihak berwenang. Selain itu, UKM harus mempunyai kepedulian melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) baik untuk kepentingan internal maupun eksternal, sehingga dapat menurunkan risiko kredit. Dengan demikian hipotesisnya:

H3 : Responsibilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko kredit

1.6.4 Independensi dan Risiko Kredit

Prinsip independensi ini menekankan bahwa pengelolaan UKM harus profesional tanpa benturan kepentingan dan tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif dan tidak ada satu pihakpun yang dirugikan. Hanifah (2015) menyatakan bahwa, implementasi independent pada UKM rata-rata sebesar 61%. Artinya, UKM di Indonesia dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak

mematuhi peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Apabila hal-hal tersebut dipatuhi, maka akan dapat menurunkan risiko kredit. Hipotesisnya:

H4 : Independensi mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko kredit

1.6.5 Fairness dan Risiko Kredit

Implementasi *good corporate governance* bermanfaat dalam rangka membantu UKM untuk memperbaiki prospek mereka dalam rangka mendapatkan alternatif pendanaan baik dari investor dan institusi keuangan. Impelementasi prinsip *governance* pada UKM berdampak langsung terhadap pelaksanaan pencatatan dan akuntansi yang proper serta pengungkapan informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan para investor pada perusahaan skalam UKM tersebut (Abor and Adjasi, 2007a; Dube, Dube and Mishra, 2011). Hanifah (2015) menunjukkan bahwa UKM telah mengimplementasikan *fairness* dalam operasional bisnisnya. Ini berarti bahwa UKM sudah menerapkan sistem keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak perbankan maupun stakeholders lain sebagai akibat dari perjanjian dan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat menurunkan risiko kredit.

H5: Fairness mempunyai pengaruh negatif Terhadap Risiko Kredit

1.6.6 *Financial Literasi, Transparansi dan Risiko Kredit*

Jika UKM mempunyai pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan keyakinan dalam pengelolaan keuangan seperti perencanaan keuangan, penggunaan financing dan pengalokasiannya, maka akan dapat memperkuat UKM dalam menyampaikan informasi secara tepat waktu, benar dan akurat kepada perbankan maupun stakeholders lain, sehingga dapat menurunkan risiko kredit. Wise (2013) menyatakan bahwa literasi keuangan memungkinkan manajer untuk menanamkan praktik keuangan yang baik dan untuk mengembangkan sistem untuk mencatat, menganalisis dan menghasilkan informasi manajemen dan keuangan yang membantu operasi dan pengambilan keputusan yang efisien untuk meningkatkan kemampuan perusahaan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih cepat. Pemantauan arus kas yang lebih baik meningkatkan akses ke perusahaan membiayai dan mengurangi risiko kredit.

H6 : Financial Literasi mampu memperkuat pengaruh transparansi terhadap risiko kredit

1.6.7 *Financial Literasi, Akuntabilitas dan Risiko Kredit*

Pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. akan memperkuat manajer UKM dalam mengimplementasikan fungsi, struktur,

sistem pertanggungjawaban proses bisnis secara jelas sehingga UKM dapat melunasi utang tepat waktu. Adomako et al., (2016); Zarook et al., (2013) menyatakan bahwa secara umum diakui bahwa manajer UKM sering mempunyai banyak peran dengan demikian literasi keuangan merupakan skill yang harus dimiliki oleh manajer UKM.

H7 : Financial literasi mampu memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap risiko kredit

1.6.8 Financial Literasi, Responsibilitas, dan Risiko Kredit

Pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan pengelolaan keuangan UKM akan memperkuat UKM dalam menyusun laporan keuangan maupun non keuangan sesuai peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak kreditur maupun stakeholders lain, sehingga dapat menurunkan risiko kredit. Hipotesisnya:

H8 : Financial literasi mampu memperkuat pengaruh responsibilitas terhadap risiko kredit

1.6.9 Financial Literasi, Independensi, dan Risiko Kredit

Semakin tinggi pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan keyakinan UKM dalam mengelola keuangan akan memperkuat UKM untuk bersikap profesional tanpa benturan kepentingan ataupun tekanan dari pihak manapun. Dengan demikian, UKM dapat melakukan pengambilan keputusan

secara obyektif serta tidak ada satu pihakpun yang dirugikan, sehingga risiko kredit bisa diturunkan. Hipotesisnya:

H9 : Financial literasi mampu memperkuat pengaruh independensi terhadap risiko kredit

1.6.10 Financial Literacy, Fairness, dan Risiko Kredit

Pengetahuan, pemahaman, ketrampilan maupun keyakinan UKM dalam mengelola keuangan akan memperkuat UKM untuk berlaku adil dan setara didalam memenuhi hak-hak pihak internal maupun eksternal yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dapat mencegah UKM dalam melakukan pengelolaan bisnis yang merugikan. Dengan demikian hipotesisnya:

H10: Financial Literasi mampu memperkuat pengaruh responsibilitas terhadap risiko kredit

BAGIAN KETIGA

GAMBARAN CORPORATE GOVERNANCE DAN FINANCIAL LITERACY UKM DI JAWA TENGAH

Dari hasil pengolahan kuisisioner diperoleh profil responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4 1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Perempuan	118	49%
Laki-laki	124	51%
Total	242	100%

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 242 responden yang diteliti terdapat 118 atau 49% responden perempuan dan 124 atau 51% responden laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih banyak dari pada responden perempuan.

Tabel 4 2. Usia Responden

Usia	Jumlah	Prosentase
17 - 27 th	45	19%
28 - 38 th	90	37%
39 - 49 th	53	22%
50 - 60 th	34	14%
> 60 th	20	8%
Total	242	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari 242 responden yang diteliti memiliki rentang usia yang berbeda. Pada rentang usia 17-27th terdapat 45 atau 19% responden. Rentang usia 28-38 th terdapat 90 atau 37% responden. Rentang usia 39-49th terdapat 53 atau 22% responden. Rentang usia 50-60th terdapat 34 atau 14% responden. Pada usia >60th terdapat 20 atau 8% responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden paling tinggi yaitu pada rentang usia produktif 28-38th, sedangkan jumlah responden paling rendah yaitu pada rentang usia lansia > 60th.

Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah	Prosentase
SD	30	12%
SMP/SLTP	79	33%
SMA/SMK/SLTA	91	38%
S1	28	12%
S2	12	5%
S3	2	1%
Total	242	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari 242 responden yang diteliti memiliki tingkat pendidikan SD terdapat 30 atau 12% responden. Tingkat pendidikan SMP/SLTP terdapat 79 atau 33% responden. Tingkat pendidikan SMA/SMK/SLTA terdapat 91 atau 38% responden. Tingkat pendidikan S1 terdapat 28 atau 12% responden. Tingkat pendidikan S2 terdapat 12 atau 5% responden. Tingkat pendidikan S3 terdapat 2 atau 1% responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah tingkat pendidikan responden paling tinggi yaitu SMA/SMK/SLTA, sedangkan jumlah tingkat pendidikan responden paling rendah yaitu S3.

Tabel 4 4. Tingkat Pendapatan Responden

Pendapatan	Jumlah	Prosentase
0 - 499 rb	53	22%
500 - 999 rb	104	43%
1000 - 1499 rb	40	17%
> 1500 rb	45	19%
Total	242	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari 242 responden yang diteliti memiliki tingkat pendapatan 0-499 rb terdapat 53 atau 22% responden. Tingkat pendapatan 500-999 rb terdapat 104 atau 43% responden. Tingkat pendapatan 1000-1499 rb terdapat 40 atau 17% responden. Tingkat pendapatan >1500 rb terdapat 45 atau 19% responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah tingkat pendapatan responden paling tinggi yaitu 500-999 rb, sedangkan jumlah tingkat pendapatan responden paling rendah yaitu 1000-1499 rb.

Tabel 4 5. Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Prosentase
1 - 6 bulan	33	14%
7 bulan - 1 th	108	45%
13 bulan - 3 th	31	13%

> 3 th	70	29%
Total	242	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa dari 242 responden yang diteliti memiliki rentang lama usaha 1-6 bulan terdapat 33 atau 14% responden. Rentang lama usaha 7 bulan – 1 th terdapat 108 atau 45% responden. Rentang lama usaha 13 bulan – 3 th terdapat 31 atau 13% responden. Rentang lama usaha > 3 th terdapat 70 atau 29% responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah lama usaha responden paling tinggi yaitu 7 bulan – 1 th , sedangkan jumlah lama usaha responden paling rendah yaitu 13 bulan – 3 th.

Tabel 4 6. Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Prosentase
Usaha Kuliner	66	27%
Usaha Konveksi	67	28%
Usaha Batik	23	10%
Usaha Kelontong	55	23%
Lainnya	31	13%
Total	242	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dari 242 responden yang diteliti yang memiliki jenis usaha kuliner terdapat 66 atau 27% responden. Jenis usaha konveksi terdapat 67 atau 28% responden. Jenis usaha batik terdapat 23 atau 10% responden. Jenis usaha kelontong terdapat 55 atau 23% responden. Jenis usaha lainnya terdapat 31 atau 13% responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah jenis usaha responden paling tinggi yaitu konveksi, sedangkan jumlah jenis usaha responden paling rendah yaitu batik.

Tabel 4 7. Berganti Jenis Usaha

Berganti jenis usaha	Jumlah	Prosentase
Ya	95	39%
tidak	147	61%
Total	242	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa dari responden yang berganti jenis usaha sebanyak 95 atau 39%, sedangkan yang tidak berganti usaha sebanyak 147 atau 61%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden yang tidak berganti jenis usaha lebih banyak dari pada responden yang berganti jenis usahanya.

Tabel 4.8. Alasan Berganti Usaha

Alasan	Jumlah	Prosentase
Persaingan	74	31%
Modal terbatas	76	31%
Skill IT dan Manj. usaha terbatas	39	16%
Keterbatasan kemampuan marketing	32	13%
Lainnya	21	9%
Total	242	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa dari 242 responden yang diteliti memiliki alasan berganti usaha karena persaingan terdapat 74 atau 31% responden. Alasan berganti usaha karena modal terbatas terdapat 76 atau 31% responden. Alasan berganti usaha karena skill IT dan manajemen usaha terbatas terdapat 39 atau 16% responden. Alasan berganti usaha karena keterbatasan kemampuan marketing terdapat 32 atau 13% responden. Alasan berganti usaha karena hal yang lain terdapat 21 atau 9% responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah alasan berganti usaha paling tinggi yaitu karena modal terbatas, sedangkan jumlah alasan berganti usaha paling rendah yaitu karena hal yang lain.

Tabel 4.9. Kendala Bisnis

Kendala Bisnis	Jumlah	Prosentase
Modal terbatas	62	26%
Pemasaran	84	35%
Kemampuan SDM	49	20%
Jumlah SDM	19	8%
Teknologi Informasi	15	6%
Lainnya	13	5%
Total	242	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa dari 242 responden yang diteliti yang memiliki kendala bisnis karena modal terbatas terdapat 62 atau 26% responden. Kendala bisnis karena pemasaran terdapat 84 atau 35% responden. Kendala bisnis karena kemampuan SDM terdapat 49 atau 20% responden. Kendala bisnis karena jumlah SDM terdapat 19 atau 8% responden. Kendala bisnis karena teknologi informasi terdapat 15 atau 6% responden. Kendala bisnis karena hal yang lain terdapat 13 atau 5% responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah kendala bisnis paling tinggi yaitu karena pemasaran, sedangkan jumlah kendala bisnis responden paling rendah yaitu karena hal yang lainnya.

Tabel 4 10. Modal Usaha

Modal Usaha	Jumlah	Prosentase
Modal sendiri	119	49%
Renternir	65	27%
Bank Syariah	19	8%
Koperasi Pasar	24	10%
Bank Konvensional	13	5%
Lainnya	2	1%
Total	242	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa dari 242 responden yang diteliti memperoleh modal usaha dari modal sendiri terdapat 119 atau 49% responden. Modal usaha dari renternir terdapat 65 atau 27% responden. Modal usaha dari bank syariah terdapat 19 atau 8% responden. Modal usaha dari koperasi pasar terdapat 24 atau 10% responden. Modal usaha dari bank konvensional terdapat 13 atau 5% responden. Modal usaha dari lainnya terdapat 2 atau 1% responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah perolehan modal usaha responden paling tinggi yaitu diperoleh dari modal sendiri, sedangkan jumlah perolehan modal usaha responden paling rendah yaitu diperoleh dari hal yang lain.

Tabel 4 11. Alasan Menggunakan Modal Sendiri

Alasan Menggunakan Modal Sendiri	Jumlah	Prosentase
Bunga tinggi	74	31%
Persyaratan jaminan berat	85	35%
Persyaratan administrasi rumit	36	15%
Sering tidak mampu melunasi pinjaman tepat waktu	28	12%
Lainnya	19	8%
Total	242	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa dari 242 responden yang diteliti memiliki alasan menggunakan modal sendiri karena bunga tinggi terdapat 74 atau 31% responden. Alasan menggunakan modal sendiri karena persyaratan jaminan berat terdapat 85 atau 35% responden. Alasan menggunakan modal sendiri karena persyaratan administrasi rumit terdapat 36 atau 15% responden. Alasan menggunakan modal sendiri karena sering tidak mampu melunasi pinjaman tepat waktu terdapat 28 atau 12% responden. Alasan menggunakan modal sendiri karena hal yang lain terdapat 19 atau 8% responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah alasan menggunakan modal responden paling tinggi yaitu karena persyaratan jaminan berat, sedangkan jumlah alasan

menggunakan modal sendiri responden paling rendah yaitu karena hal yang lain.

Tabel 4.12. Jumlah Karyawan

Jumlah Karyawan	Jumlah	Prosentase
Tidak ada	104	43%
2 -5 orang	99	41%
6 - 10 orang	22	9%
> 10 orang	17	7%
Total	242	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa dari 242 responden yang diteliti tidak memiliki karyawan terdapat 104 atau 43% responden. Responden yang memiliki 2-5 orang karyawan terdapat 99 atau 41% responden. Responden yang memiliki 6-10 orang karyawan terdapat 22 atau 9% responden. Responden yang memiliki >10 orang karyawan terdapat 17 atau 7% responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa paling tinggi responden tidak memiliki karyawan, sedangkan paling rendah responden memiliki >10 karyawan.

Tabel 4 13. Kepemilikan Bisnis

Pemilikan Bisnis	Jumlah	Prosentase
Milik sendiri	129	53%
Milik keluarga	70	29%
Mitra dengan teman	23	10%
Franchisee	15	6%
Lainnya	5	2%
Total	242	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa dari kepemilikan bisnis 242 responden yang diteliti milik sendiri terdapat 129 atau 53% responden. Milik keluarga terdapat 70 atau 29%. Mitra dengan teman terdapat 23 atau 10% responden. Franchisee terdapat 15 atau 6% responden dan lainnya terdapat 5 atau 2% responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan bisnis paling tinggi yaitu dari milik sendiri, sedangkan jumlah kepemilikan bisnis paling rendah yaitu dari hal yang lain.

Tabel 4 14. Aktifitas Pencatatan Usaha Bisnis

Pencatatan Usaha Bisnis	Jumlah	Prosentase
Tidak pernah ada pencatatan tertulis	120	50%
Pencatatan transaksi jual beli dan keuntungan	82	34%
Pencatatan laporan keuangan	30	12%
Lainnya	10	4%
Total	242	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa dari 242 responden yang diteliti tidak memiliki aktifitas pencatatan tertulis dalam usahanya terdapat 120 atau 50% responden. Usaha bisnis yang memiliki aktifitas pencatatan transaksi jual beli dan keuntungan terdapat 82 atau 34% responden. Usaha bisnis yang memiliki pencatatan laporan keuangan terdapat 30 atau 12% responden. Usaha bisnis yang memiliki pencatatan lainnya terdapat 10 atau 4% responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah aktifitas pencatatan usaha bisnis responden paling tinggi yaitu usaha bisnis yang tidak pernah ada pencatatan dalam usaha bisnisnya, sedangkan jumlah aktifitas pencatatan usaha bisnis responden paling rendah yaitu pencatatan dari hal yang lain.

BAGIAN KEEMPAT

ANALISIS PERAN CORPORATE GOVERNANCE DAN FINANCIAL LITERACY DALAM MENURUNKAN RISIKO KREDIT

4.1 Uji instrument

Dari hasil pengujian validitas dan reliabilitas data kuisioner diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4 15. Uji Validitas

Variabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Transparansi	0,000	Valid
Akuntabilitas	0,000	Valid
Responsibility	0,000	Valid
Fairness	0,000	Valid
Independen	0,000	Valid

Variabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Financial Literacy	0,000	Valid
Resiko Kredit	0,000	Valid

Sumber : Output SPSS, 2019.

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh hasil pengujian validitas masing-masing nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil pengukuran kuisisioner dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur suatu penelitian.

Tabel 4 16. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.861	12

Sumber : Output SPSS, 2019.

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh hasil pengujian reliabilitas dengan nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0.861 > 0.60$. Hal tersebut menunjukkan bahwa jawaban responden atas pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

4.2 Uji asumsi klasik

Dari hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas data kuisioner diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4 17. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,351

Sumber : Output SPSS, 2019.

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh hasil pengujian normalitas dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,351 > 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data penelitian terdistribusi normal.

Tabel 4 18. Uji Multikolinearitas

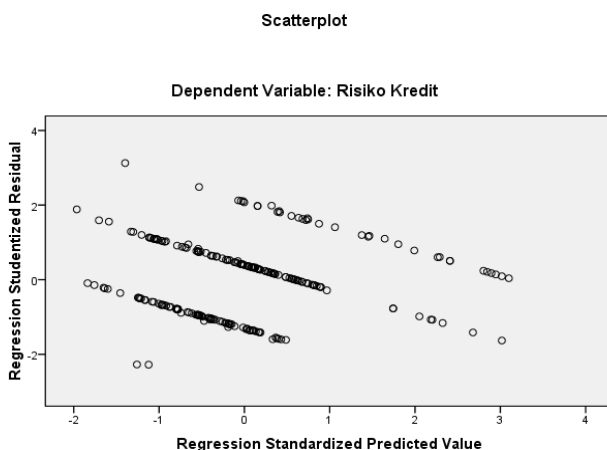
Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Transparansi	0.732	1.367	Tidak terjadi multikolinearitas
Akuntabilitas	0.920	1.088	Tidak terjadi multikolinearitas
Responsibility	0.607	1.647	Tidak terjadi multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Fairness	0.664	1.507	Tidak terjadi multikolinearitas
Independen	0.711	1.407	Tidak terjadi multikolinearitas
Financial Literacy	0.790	1.265	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Output SPSS, 2019.

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh hasil pengujian multikolinearitas masing-masing variabel dengan nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF > 10 . Hal tersebut menunjukkan bahwa data penelitian terjadi multikolinearitas.

Gambar 4 1. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS, 2019.

Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh hasil pengujian heteroskedastisitas dari variabel penelitian terlihat adanya pola yang teratur. Hal tersebut menunjukkan bahwa data penelitian terjadi *heteroskedastisitas*.

4.3 Deskripsi Variabel

Deskripsi variabel diperoleh dari hasil tanggapan responden dalam bentuk skala likert, yaitu skala 5. Sebelum melakukan deskripsi variabel, didahului dengan menentukan rentang skala jawaban responden dengan rumus sebagai berikut: (Ghozali, 2006)

$$RS = \frac{(m-n)}{K}$$

Keterangan :

RS = Rentang skala

m = Angka tertinggi dalam pengukuran

n = Angka terendah dalam pengukuran

K = Banyaknya kelas/ kategori yang dibentuk

$$\begin{aligned} \text{maka,} \quad RS &= \frac{(5-1)}{3} \\ &= 1.33 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut diatas, maka interpretasi jawaban responden akan dikategorikan sebagai berikut: rendah dengan rentang nilai 1-2.33, sedang dengan rentang nilai 2.34 -3.67 dan tinggi dengan rentang nilai 3.68-5.

Nilai variabel transparansi rata-rata 3.4107 yang berarti sedang, artinya bahwa UKM belum dapat menyapaikan informasi kepada perbankan maupun stakeholders lain secara tepat dan tepat. Accountability dengan nilai 3.3285 pada kelompok sedang, variabel responsibility dengan nilai rata-rata 3.4603 pada kelompok sedang yang artinya bahwa Variabel independensi sebesar 3.5140 pada kelompok sedang artinya Variabel fairness dengan nilai 3.6707 sedang artinya variabel financial literacy dengan nilai 3,7438 berada pada kelompok tinggi, artinya bahwa manajer UKM sudah mempunyai pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan keyakinan dalam pengelolaan keuangan, produk dan layanan yang ditawarkan perbankan serta risikonya. Variabel credit risk dengan nilai 3.7680 berada pada kelompok tinggi artinya bahwa tingkat kegagalan UKM untuk membayar utang pada kelompok tinggi.

4.4 Uji Hipotesis

Tabel 4 19. Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.751	1.151		5.862	0.000
Transparansi	-0.627	0.227	-0.875	-2.759	0.066
Akuntabilitas	-0.623	0.242	-0.787	-2.574	0.071

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
	Responsibility	-0.531	0.284	-0.644	-1.871	0.063
	Fairness	0.192	0.271	0.247	0.706	0.481
	Independen	0.426	0.262	0.541	1.626	0.105
1	Financial Literasi	-1.059	0.315	-1.124	-3.367	0.001
	Transparansi*Financial Literacy	0.165	0.057	1.217	2.910	0.004
	Akuntabilitas*Financial Literacy	0.148	0.065	0.918	2.273	0.024
	Responsibility*Financial Literacy	0.170	0.073	1.200	2.347	0.020
	Independen*Financial Literacy	-0.023	0.075	-0.164	-0.308	0.759
	Fairness*Financial Literacy	-0.083	0.069	-0.587	-1.199	0.232

Dependent Variable: Credit Risk

BAGIAN KELIMA

PENGARUH PERAN CORPORATE GOVERNANCE DAN FINANCIAL LITERACY DALAM MENURUNKAN RISIKO KREDIT UKM DI JAWA TENGAH

5.1 Transparansi Mempunyai Pengaruh Terhadap Risiko Kredit

Hipotesis pertama menyatakan bahwa transparansi sebagai mekanisme *corporate governance* mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko kredit. Namun hasil regresi pada hipotesis 1 menunjukkan bahwa transparansi sebagai mekanisme *corporate governance* tidak mempunyai pengaruh terhadap risiko kredit. Hasil ini diperkuat oleh Hal ini disebabkan UKM di Indonesia mampu menyusun laporan keuangan atau non-keuangan secara cepat dan tepat, dan tanpa perencanaan usaha yang sistematis dan terarah. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian

Hanifah (2015). Dengan demikian UKM sudah mulai menyampaikan informasi keuangan maupun non keuangan secara cepat dan tepat baik kepada perbankan sebagai principal maupun kepada stakeholders lain. Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa dari 242 responden yang diteliti tidak memiliki aktifitas pencatatan tertulis dalam usahanya terdapat 120 atau 50% responden. Usaha bisnis yang memiliki aktifitas pencatatan transaksi jual beli dan keuntungan terdapat 82 atau 34% responden. Usaha bisnis yang memiliki pencatatan laporan keuangan terdapat 30 atau 12% responden. Usaha bisnis yang memiliki pencatatan lainnya terdapat 10 atau 4% responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah aktifitas pencatatan usaha bisnis responden paling tinggi yaitu usaha bisnis yang tidak pernah ada pencatatan dalam usaha bisnisnya, sedangkan jumlah aktifitas pencatatan usaha bisnis responden paling rendah yaitu pencatatan dari hal yang lain.

5.2 Akuntabilitas Mempunyai Pengaruh Terhadap Risiko Kredit

Hipotesis kedua menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai mekanisme *corporate governance* mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko kredit. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas sebagai mekanisme *corporate governance* dapat menurunkan risiko kredit. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Hanifah (2015) bahwa implementasi *akuntabilitas* pada UKM sangat buruk yaitu sebesar 27%. Ini berarti bahwa UKM saat ini sudah memiliki pedoman, aturan

dan sistem yang menjelaskan fungsi, implementasi, dan akuntabilitas manajemen perusahaan. Fenomena ini didukung dengan karakteristik UKM di Indonesia masih *one man show*, *family business*, sehingga tidak ada pemisahan antara kepemilikan dan kontrol. Seseorang bisa menjabat sebagai direktur sekaligus sebagai pemilik perusahaan, bahkan sering terjadi bahwa fungsi-fungsi manajemen yang lain dipegang oleh satu orang (Wahyudi, 2008).

5.3 Responsibilitas Mempunyai Pengaruh Terhadap Risiko Kredit

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa responsibilitas sebagai mekanisme *corporate governance* mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko kredit. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa *responsibility* sebagai mekanisme *corporate governance* tidak dapat menurunkan risiko kredit. UKM belum sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan, dan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan serta kepada pihak berwenang. Hal ini sangat beralasan karena UKM di Indonesia belum ada peraturan yang sempurna dan belum ada sanksi jika melanggar aturan tersebut.

5.4 Independensi Mempunyai Pengaruh Terhadap Risiko Kredit

Hipotesis keempat menyatakan bahwa independensi sebagai mekanisme *corporate governance* mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko kredit. Namun hasil penelitian

menunjukkan bahwa independensi tidak dapat menurunkan risiko kredit. Artinya bahwa Model pengelolaan manajemen UKM yang mayoritas masih *one man show* atau *single fighter* (Hanifah, 2015), sehingga UKM tidak dikelola secara profesional bahkan merasa tidak perlu ada tekanan dari manapun sehingga sering tidak mematuhi peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa dari kepemilikan bisnis 242 responden yang diteliti milik sendiri terdapat 129 atau 53% responden. Milik keluarga terdapat 70 atau 29%.

5.5 Fairness Mempunyai Pengaruh Terhadap Risiko Kredit

Hipotesis kelima menyatakan bahwa *fairness* sebagai mekanisme *corporate governance* mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko kredit. Namun berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa Fairness tidak dapat menurunkan risiko kredit. Ini berarti bahwa sistem keadilan dan kesetaraan yang dilakukan manajer UKM belum dapat memenuhi hak-hak perbankan maupun stakeholders lain sebagai akibat dari perjanjian dan undang-undang yang berlaku, sehingga implementasi *fairness* tidak dapat menurunkan risiko kredit UKM. Hanifah (2015), beberapa indikator *corporate governance*, yaitu: *Fairness*: 1). Posisi seimbang hak dan kewajiban antara pemilik dan karyawan, 2). Saluran untuk pemilik Untuk menyampaikan pendapatnya, c). Memberikan informasi yang relevan d). Perlindungan pemilik perusahaan Karakteristik UKM dimiliki sendiri 129 (53%) dan milik keluarga 70 (29%).

5.6 Financial Literasi Mampu Memoderasi Pengaruh Transparansi Terhadap Risiko Kredit

Hipotesis keenam menyatakan bahwa *financial literacy* dapat memoderasi pengaruh *transparansi* sebagai mekanisme *corporate governance* terhadap risiko kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial literacy* yang ditunjukkan oleh pengetahuan, pemahaman, ketrampilan UKM dalam mengelola keuangan termasuk membuat laporan keuangan, maka akan dapat memperkuat UKM dalam menyampaikan laporan keuangan maupun non keuangan secara cepat, benar dan tepat waktu. Pemahaman dan ketrampilan keuangan memungkinkan manajer untuk membuat strategi keuangan dan akses ke keuangan tepat waktu untuk menangani keputusan keuangan yang kompleks (Stadler et al., 2013). Dengan demikian akan memperkuat UKM menurunkan risiko kredit UKM. Lusardi and Mitchell (2014) menyatakan bahwa *financial literacy* dalam konteks perusahaan lebih spesifik, di mana manajer harus memahami, menganalisis dan membuat keputusan keuangan.

5.7 Financial Literasi Mampu Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Risiko Kredit

Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa *financial literacy* dapat memoderasi pengaruh *akuntabilitas* sebagai mekanisme *corporate governance* terhadap penurunan risiko kredit. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial literacy* yang ditunjukkan oleh pengetahuan, pemahaman, ketrampilan UKM dalam mengelola keuangan termasuk

membuat laporan keuangan, maka akan dapat memperkuat pengaruh mekanisme *corporate governance* dalam menurunkan risiko kredit UKM.

5.8 Financial Literasi Mampu Memoderasi Pengaruh Responsibilitas Terhadap Risiko Kredit

Hipotesis kedelapan menyatakan bahwa *financial literacy* dapat memoderasi pengaruh responsibilitas sebagai mekanisme *corporate governance* terhadap penurunan risiko kredit. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial literacy* yang ditunjukkan oleh pengetahuan, pemahaman, ketrampilan UKM dalam mengelola keuangan termasuk membuat laporan keuangan, ternyata tidak mampu memperkuat pengaruh mekanisme *corporate governance* dalam menurunkan risiko kredit UKM.

5.9 Financial Literasi Memoderasi Pengaruh Independensi Terhadap Risiko Kredit

Hipotesis kesembilan menyatakan bahwa *financial literacy* dapat memoderasi pengaruh independensi sebagai mekanisme *corporate governance* terhadap penurunan risiko kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial literacy* yang ditunjukkan oleh pengetahuan, pemahaman, ketrampilan UKM dalam mengelola keuangan termasuk membuat laporan keuangan, ternyata tidak dapat memperkuat UKM dalam bertindak secara independent dalam pengambilan keputusan keuangan sehingga tidak berdampak terhadap risiko kredit.

5.10 Financial Literasi Tidak Dapat Memoderasi Pengaruh Fairness Terhadap Risiko Kredit

Hipotesis kesepuluh menyatakan bahwa *financial literacy* dapat memoderasi pengaruh *fairness* sebagai mekanisme *corporate governance* terhadap penurunan risiko kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial literacy* yang ditunjukkan oleh pengetahuan, pemahaman, ketrampilan UKM dalam mengelola keuangan termasuk membuat laporan keuangan, ternyata tidak dapat memperkuat pengaruh *fairness* sebagai mekanisme *corporate governance* dalam menurunkan risiko kredit UKM. Model pengelolaan manajemen UKM masih *one man show, family business*, sehingga tidak ada pemisahan antara kepemilikan dan kontrol. Seseorang bisa menjabat sebagai direktur sekaligus sebagai pemilik perusahaan, bahkan sering terjadi bahwa fungsi-fungsi manajemen yang lain dipegang oleh satu orang (Wahyudi, 2008).

BAGIAN KEENAM

EPILOG

6.1 Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah lolos uji instrumen seperti uji validitas dan uji reliabilitas serta uji asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, hasil regresinya menunjukkan bahwa *corporate governance* yang ditunjukkan oleh transparansi, akuntabilitas dapat menurunkan risiko kredit UKM. Namun *responsibility*, *independensi* dan *fairness* tidak dapat menurunkan risiko kredit. Artinya bahwa mekanisme *corporate governance* secara mayoritas tidak efektif dalam menurunkan risiko kredit. Namun setelah dimoderasi oleh *financial literacy* maka transparansi, akuntabilitas dan *responsibilitas* sebagai mekanisme *corporate governance* mampu menurunkan risiko kredit bagi UKM di Indonesia. Artinya bahwa dalam implementasi *corporate governance* harus didukung dengan pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan

pelaku UKM dalam pengelolaan keuangan, sehingga efektif dalam menurunkan risiko kredit. Implikasi manajerialnya adalah pelaku UKM harus meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta ketrampilan dalam mengelola keuangan, sehingga dalam melakukan pengambilan keputusan pendanaan dapat terhindar dari risiko kredit. Implikasi teoritisnya adalah bahwa penelitian ini dapat mengembangkan *resource based theory* dan *corporate governance theory*. Artinya bahwa manajer UKM di Indonesia mayoritas berada pada usia produktif yang sangat mudah untuk dikembangkan kompetensinya terutama dalam bidang bisnis dan keuangan.

6.2 Keterbatasan dan *Future Research*

Kelemahan UKM dalam sampel diambil dari campuran dari berbagai sektor industri, sehingga untuk penelitian yang akan datang dapat dikembangkan untuk analisis per sector industry, misalnya: industry kuliner, industry kreatif dan sebagainya. Selain itu, penelitian yang akan datang dapat menggunakan variabel moderasi lain seperti: infrastruktur, regulasi, kondisi ekonomi dan sebagainya.

6.3 Implikasi

Hasil penelitian ini akan memberikan implikasi sebagai berikut: a). UKM seharusnya meningkatkan financial literacy yaitu pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan keuangan bagi UKM, sehingga UKM mampu menerapkan corporate governance dengan baik. Akibat lebih lanjut adalah bahwa UKM akan mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan,

mempermudah akses kredit karena risiko kredit UKM rendah. Dengan demikian UKM dapat mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik, sehingga UKM berkembang pesat dan *sustain* dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abor, J. and Adjasi, C. K. D. (2007), "Corporate governance and the small and medium enterprises sector: theory and implications", *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, Vol. 7 No. 2, pp. 111-122.
- Adomako, S., Danso, A., & Damoah, J. (2016). The Moderating Influence of Financial Literacy on the Relationship Between Access to Finance and Firm Growth in Ghana. *International Journal of Entrepreneurial Finance* , 18 (1), 43-61.
- Anton, Setyawan Agus, et.al., 2015. An Assesment of SME Competitiveness in Indonesia, *Journal of Competitiveness* Vol.7, Issue 2, page 3, June 2015.
- Anthony Abiodun Eniola, and Entebang, Harry (2016),"Financial literacy and SME firm performance", *International Journal of Research Studies in Management*, April, Volume 5 Number 1, 31-43
- Aribawa, D. (2016). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Siasat Bisnis* , 20 (1), 1-13.

- Arafat, 2008, How To Implement Good Corporate Governance Effectively, Jakarta: Skyrocketing Publisher
- Andrews, A., & Gikunoo, E. (2011). Small Scale Foundries in Ghana: The Challenges. Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies , 1-12.
- Asunka Benjamin (2017)," A Case for Regulating Corporate Governance for SMEs in Ghana International Journal of Business and Management; Vol. 12, No. 4; 2017 ISSN 1833-3850 E-ISSN 1833-8119
- Ashley Mutezo, (2013)," Credit Rationing And Risk Management For Smes: the Way Forward For South Africa Corporate Ownership & Control / Volume 10, Issue 2, 2013, Continued - 1
- Binh Dao & Hoa Pham (2015),"Corporate Governance and Bank Credit Risk: Default Probability, Distance to Default", SSRN Electronic Journal
- Coleman, Susan, Carmen Cotei, Joseph farhat (2013)," A Resource-Based View Of New Firm Survival: New Perspectives On The Role Of Industry And Exit Route", Journal of Developmental Entrepreneurship Vol. 18, No. 1 (2013) 1350002 (25 pages)
- Dzigba, David (2015),"Corporate Governance Practice among Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) in Ghana; Impact on Access to Credit", Master's Thesis in Business Administration, MBA programme.

- Eresia-Eke, C., & Raath, C. (2013). SMME Owners' Financial Literacy and Business Growth. *Mediterranean Journal of Social Sciences* , 4 (13), 397-406.
- Hanifah (2015), "The Implementation Of Good Corporate Governance In Efforts To Increase Profits In Small Medium Enterprises (Smes)", *International Journal of Business*,
- Jaswadi, Mohammad Iqbal, Sumiadji (2015), " SME Governance in Indonesia - A Survey and Insight from Private Companies", *International Accounting And Business Conference 2015, IABC*
- Javed Hussain, Samuel Salia, Amin Karim, (2018) "Is knowledge that powerful? Financial literacy and access to finance: An analysis of enterprises in the UK", *Journal of Small Business and Enterprise Development*, <https://doi.org/10.1108/JSBED-01-2018-0021>
- Fatoki, O. (2014). The Financial Literacy of Micro Entrepreneurs in South Africa. *Journal of Social Science* , 40 (2), 151-158.
- Kolapo, T. Funso, R. Kolade Ayeni, and M. Ojo Oke. (2012). Credit Risk and Commercial Banks Performance in Nigeria: A Panel Model Approach. *Australian Journal of Business and Management Research*, 2 (2): 31
- Maseko, Nelson and Onias Manyani (2011), " Accounting practices of SMEs in Zimbabwe: An investigative study of record keeping for performance measurement (A case study of Bindura) *Journal of Accounting and Taxation* Vol. 3(8), pp. 171-181, December 2011 Eniola,

- A., & Entebang, H. (2016). Financial Literacy and SME Firm Performance. *International Journal of Research Studies in Management* , 5 (1), 31-43.
- Mutamimah dan Hendar (2017)), "Islamic Financial Inclusion: Supply Side Approach", *Proceeding, 5TH Asean Universities International Conference of Islamic Finance (5THAICIF)*, Negara Brunei Darussalam
- Mutamimah. (2020). Financial technology and E-corporate governance model for Small Medium Enterprises. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 993, pp. 907–913). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22354-0_84
- Mutamimah, & Hendar. (2017, December 13–14). Islamic financial inclusion: Supply side approach. In *5th ASEAN International University Conference on Islamic Finance (5th AICIF)*. Jerudong Brunei Darussalam.
- Sri Haryati and Emanuel Kristijadi (2014), "The Effect Of GCG Implementation And Risk Profile On Financial Performance At Go-Public National Commercial Banks", *Journal of Indonesian Economy and Business*, Volume 29, Number 3, 2014, 237 - 250
- Z. Zairani Z. A. Zaimah (2013), "Difficulties in Securing Funding from Banks: Success Factors for Small and Medium Enterprises (SMEs)", *Journal of Advanced Management Science* Vol. 1, No. 4, December

Dzigba, David (2015), "Corporate Governance Practice among Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) in Ghana; Impact on Access to Credit", Master's Thesis in Business Administration, MBA programme

Smith, S. (2011), "Beg, borrow, and deal? Entrepreneurs' choice of financing and new firm innovation", available at: <http://ssrn.com/abstract=1573685>

Solomon Dan Solomon, 2004, Corporate Governance and Accountability, England: John Wiley and Sons Ltd.

TENTANG PENULIS



Dr Indri Kartika, SE., M.Si., Ak., CA., adalah pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). Lahir di Kebumen, 13 Agustus 1964. Menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Diponegoro, pada tahun 1988, S2 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada tahun 1994 dan S3 Akuntansi di Universitas Diponegoro tahun 2009. Bidang riset yang diminati adalah corporate governance, corporate social responsibility dan akuntansi keuangan. Beberapa artikel mengenai bidang-bidang tersebut telah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi maupun jurnal terindeks Sinta. Penulis adalah reviewer pada Jurnal Akuntansi Indonesia (JAI). Buku yang telah dihasilkan antara lain: Akuntansi Pengantar, Minimalisasi *Non Performing Financing* (NPF) dalam Upaya Peningkatan Kinerja Perbankan Syariah. Penulis juga aktif dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) baik tingkat nasional maupun tingkat wilayah Jawa Tengah.



Prof. Dr. Mutamimah, SE, MSi., lahir di Pacitan, 13 September 1967 adalah staf pengajar tetap pada Jurusan Manajemen, Magister Manajemen, dan Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi, Unissula, Semarang. Lulus Sarjana Ekonomi (S1) dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Magister Sains (MSi) dan Doktor Ilmu Manajemen dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau juga aktif sebagai peneliti, trainer pada sejumlah BUMN maupun non-BUMN, pembicara pada tingkat nasional maupun internasional, reviewer penelitian maupun reviewer artikel pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional. Di sela-sela kesibukannya, juga aktif sebagai pengurus pada organisasi profesi, yaitu: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Association of Lecturer for Financial and Economic Development (ALFED), Forum Manajemen Indonesia (FMI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan Indonesian Finance Association (IFA).